

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH  
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI  
SUMATERA BARAT**

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



*Oleh:*

**DORI SAPUTRA**

**2008/02152**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

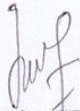
**Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten  
Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat**

Oleh :  
**Dori Saputra**  
02152 / 2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode  
Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Januari 2014

**Pembimbing 1**



**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**  
Nip. 19710302 199802 2 001

**Pembimbing II**



**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
Nip. 19730213 199903 1 003

# ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Dori Saputra

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : doriboder@yahoo.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan : 1) rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011, 2) rasio efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011, 3) trend kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011, 4) trend efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan : 1) Bagi Pemerintah daerah otonom, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, seperti melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci** : kinerja keuangan , rasio kemandirian, rasio efektivitas, trend kemandirian, dan trend efektivitas.

## Abstract

*This study aims to examine the financial performance of the government district and city in West Sumatra by : 1 ) the ratio of the area of financial independence in the 2004-2011 budget period , 2 ) the ratio of the area of financial effectiveness of the 2004-2011 budget period , 3 ) the trend of regional financial independence in the 2004-2011 budget period , 4 ) the effectiveness of regional financial trends in the 2004-2011 budget period .*

*This research is a descriptive study . The population in this study is the regencies and cities in West Sumatra . The samples in this study were all regencies and cities in West Sumatra . The data is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of West Sumatra Province . The data analysis technique used is the ratio analysis technique to measure the financial performance of government .*

*The results showed : 1 ) The ratio of the area of financial independence on average is at 6.5 % with a very low category from year 2004 to 2011 . 2 ) Effectiveness Ratio PAD are at an average of 109.8 % with a tendency to be very effective category of the year 2004-2011 . 3 ) financial independence Trend area average is at 95.3 % from the year trend from 2005 to 2011 . 4 ) Trend of financial effectiveness of regional average is at 116.2 % of year trend from 2005 to 2011 .*

*Based on the above results , it is suggested : 1 ) For the Government of the autonomous region , preferably in developing and merealisasikan budget needs to consider financial ratios for the next period so as to increase local revenues , such as through the optimization of the intensification and extension of local taxation and levies . 2 ) For further Researcher , can expand the place and time of the study , as well as the use of measurement tools / other ratio as a tool of analysis of the financial performance of local government .*

**Key words** : financial performance, independence ratio, the ratio of effectiveness, independence trend, and the trend of effectiveness.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah

daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta-merta mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro (2002) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio

efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis *shift*), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis *share*).

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:128).

Amin (2000) menyatakan bahwa persentase *trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Analisis *trend* digunakan untuk mengetahui, baik arah perkembangan kemandirian keuangan maupun efektivitas keuangan daerah.

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Dwirandra (2006). Melakukan penelitian tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian sebagai alat analisis. Kabupaten/Kota di Bali dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif. Rasio efektivitas keuangan berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas 100%. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sedang (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 25% sampai dengan 50%).

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat”**.

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011?
3. Bagaimana *trend* kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi

Sumatera Barat pada periode anggaran 2004-2011?

4. Bagaimana *trend* efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat pada periode anggaran 2004-2011?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011.
2. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011.
3. Perkiraan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan *trend* kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011.
4. Perkiraan Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan *trend* efektivitas keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011.

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis  
Untuk menemukan bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah  
Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu penge-tahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

4. Bagi pihak lain  
Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Otonomi daerah**

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2004:22).

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2004:76).

#### **a. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Amandemen UUD 1945 menjadi acuan konstitusi dalam penetapan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah. Dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi

daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik di kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, maka perubahan-perubahan konsepsi otonomi terlihat banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu (Bastian, 2006:337).

#### **b. Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Daerah Otonom**

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001:167) adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

#### **c. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi daerah**

Secara kualitatif pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya tersebut dapat dirasakan sebagai berikut :

1. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan semakin meningkat.
2. Peran serta aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam penentuan kebijakan, dan pelaksanaan maupun proses evaluasi dan pengawasan semakin meningkat.
3. Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya.
4. Meningkatkan gairah birokrasi pemerintahan daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbukanya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi profesional.

5. Meningkatkan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan tepercaya sangat didambakan oleh masyarakat.
6. Meningkatkan DPRD, sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
7. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat secara bertahap semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan lebih baik.
8. Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya.

Beberapa hal yang perlu mendapat prioritas dalam pemantapan otonomi daerah adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kemitraan antar pemerintah kabupaten dan DPRD serta kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah kabupaten,
2. Penataan kelembagaan dan sinkronisasi harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah,
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan sinergis pelaku pembangunan terkait,
5. Peningkatan koordinasi dengan pusat dan propinsi serta kerja sama antar daerah.

#### **2. Keuangan Daerah**

Menurut Yani (2009:347), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Yani (2009:357) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Halim (2007:20) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a. Pendapatan  
Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
- b. Belanja  
Dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

#### c. Pembiayaan

Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU. No. 5 / tahun 1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu;

##### 1). Pendapatan asli daerah yang meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

##### 2). Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:

- a. Sumbangan dari pemerintah;
- b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD).

Ketergantungan yang tinggi dari keuangan daerah terhadap pusat tersebut tidak lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintah di Daerah". Undang-undang tersebut lebih tepat



disebut sebagai penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik daripada desentralistik. Unsur sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah”. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004, perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.

## **Kinerja Keuangan Daerah**

### **a. Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada *input* (masukan) program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).

Menurut Nordiawan (2010:158), pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik (Mahmudi, 2007 dalam Halim, 2007:158).

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi  
Penilaian kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai  
Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang cara mereka seharusnya bertindak, serta memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  
Saat ini, kinerja harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus lebih baik daripada sekarang.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan  
Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan

sistem *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

- 5) Memotivasi pegawai  
Dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*.
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik  
Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri (Hirawan, 1990: 26). Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Syamsi, 1986: 99).

- 1) Kemampuan struktural organisasinya.  
Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- 2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah  
Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran

saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

- 3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat  
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
- 4) Kemampuan keuangan daerah  
Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti, *Return Of Investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*Net Profit*". Kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

## **b. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis keuangan menurut Halim (2001) merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Sedangkan pada pasal 4 PP

Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah

masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis *shift*), rasio proporsi pendapatan dan belanja daerah (analisis *share*).

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)**

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128) sebagai berikut.

$$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan PP/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat

dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	0-60

Sumber: *Keppmendagri No.690.900-327,1996*

**Tabel 1**  
**Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: *Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002*

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

$$RE = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Keppmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2

**Tabel 2**

**Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90

### Trend Kemandirian Keuangan Daerah

Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Amin (2000) menyatakan bahwa persentase *trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar.

Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase *trend* KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, tahun 2004 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan KKD pada tahun berikutnya (tahun 2005 sampai dengan 2011). Dengan demikian, *trend* yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan

yang terjadi dengan diimplementasikannya reformasi otonomi dan keuangan daerah.

Dari penjelasan ini maka *trend* kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$Trend\ KKD = \frac{KKD\ pada\ t_0 + 1}{KKD\ pada\ t_0}$$

### Trend Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.

Amin (2000) menyatakan bahwa persentase *trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar.

Analisis *trend* efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase *trend* EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan

daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, tahun 2004 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan EKD pada tahun berikutnya (tahun 2005 sampai dengan 2011). Dengan demikian, *trend* yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan yang terjadi dengan diimplementasikannya reformasi otonomi dan keuangan daerah.

Dari penjelasan ini maka *trend* efektivitas keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$Trend\ EKD = \frac{EKD\ pada\ t_0 + 1}{EKD\ pada\ t_0}$$

Hasil dari analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk (Halim, 2007:230):

- Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- Melihat pertumbuhan/perkembangan Perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Dwirandra (2006). Melakukan penelitian tentang efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002-2006. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kemandirian sebagai alat kabupaten/kota di Bali dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif. Rasio efektivitas keuangan berkisar dari

75,01% sampai dengan di atas 100%. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sedang (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio Kemampuan Keuangan Daerah lebih dari 25% sampai dengan 50%).

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslina (2003) disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah” studi kasus Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ruslina mengemukakan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang diukur melalui PAD, hanya mencapai rata-rata sebesar 2,93% untuk setiap tahun anggaran dengan peningkatan tiap tahun sebesar 0,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan. Pendapatan daerah masyarakat Maluku Tenggara sebagian besar masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu rata-rata 56% dari total pendapatan yang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika menggunakan indikator PAD, maka Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka melaksanakan otonomi daerah masih belum mampu ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerahnya sebab masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Rasio efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002 rata-rata 89,59 dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 7,22%. Dengan demikian pemungutan PAD di Kabupaten Maluku Tenggara cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai kurang dari 100%. Akan tetapi dari hasil analisis trend dengan metode *Least Square* terlihat adanya peningkatan rasio efektivitas dari tahun ke tahun yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Rasio efisiensi pemungutan

PAD Kabupaten Maluku Tenggara selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 2002 rata-rata sebesar 3,27% dan setiap tahun anggaran mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD semakin proporsional dengan realisasi PAD yang didapatkan. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Suprpto (2006) melakukan penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam masa otonomi daerah tahun 2000-2004. Peneliti menggunakan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi dalam mengukur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Sleman sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Pada rasio efektivitas Kabupaten Sleman menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena setiap tahunnya target PAD yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi PAD yang diterima lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan PAD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD semakin proporsional.

Simatupang (2007: 88) melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah, dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan *Mann-Whitney Test*

secara statistik tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

Selanjutnya Diana (2008) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas laporan keuangan pemerintah propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan perkembangan APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemda propinsi Se-Sumbagsel dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan Pemerintah daerah dan hasil analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima propinsi memiliki nilai elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda *Kolmogorof Smirnov* dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Propinsi se-Sumatera bagian Selatan.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah di kemukakan dan rumusan masalah. Keterpautan maupun hubungan antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori.

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum terdiri dari tingkat kemandirian

keuangan daerah, tingkat efektivitas keuangan daerah dan tingkat efisiensi keuangan daerah. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari indikator efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya akan dilihat perubahan kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi.

Untuk lebih jelasnya akan penelitian ini, maka uraian di atas dapat diperlihatkan pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## 3. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausal komparatif (*expost facto*).

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat.

Metode sampel yang digunakan adalah total sampling.

### Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD periode anggaran 2004 sampai dengan 2011 yang berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Data tersebut berupa Laporan

perhitungan APBD periode 2004 sampai dengan 2011. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi.

## Teknik Analisis Data

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan PP/Propinsi dan Pinjaman}}$$

### 2. Rasio efektivitas keuangan daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234).

Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah}}$$

### 3. Trend Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase *trend* KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dari penjelasan ini maka *trend* kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0 + 1}{\text{KKD pada } t_0}$$

### 4. Trend efektivitas keuangan daerah

Analisis *trend* efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase *trend* EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat.

Dari penjelasan ini maka *trend* efektivitas keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD pada } t_0 + 1}{\text{EKD pada } t_0}$$

## Defenisi Operasional

1. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
2. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain



sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.
  - a) Analisis rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan kabupaten/kota terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
  - b) Analisis rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
  - c) Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi kemandirian keuangan daerah tersebut.
  - d) Analisis *trend* efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah tersebut.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum objek Penelitian

Propinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara dan 3°30' Lintang Selatan, serta 98° 36 dan 101° 53' Bujur Timur, tercatat memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu Km<sup>2</sup>. Luas tersebut setara dengan 2,21 persen dari luas Republik Indonesia. Propinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat pulau Sumatera sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Propinsi Riau, Propinsi Jambi, dan Propinsi Sumatera Utara.

Sumatera Barat memiliki 391 gugusan pulau dengan jumlah pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pulau terkecil dimiliki oleh Kabupaten Agam.

Mulai tahun 2001 Propinsi Sumatera Barat yang semula terdiri dari 14 kabupaten/kota terjadi penambahan kabupaten/kota yang baru seperti Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian di tahun 2004

terjadi pemekaran wilayah lagi, antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Solok Selatan, yang masing-masing merupakan pecahan dari Kabupaten Pasaman, Sijunjung, dan Solok. Kini, Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota dengan Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km<sup>2</sup> atau sekitar 14,21% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km<sup>2</sup> sekitar 0,05%. Selama kurun waktu 2009-2010 jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa di Sumatera Barat tidak mengalami penambahan. Sedangkan jumlah nagari dan jorong mengalami penambahan di tahun 2010 menjadi 628 nagari dan 3.545 jorong.

##### Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat yang berupa laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2004-2011 dapat dibuat perhitungan rasio kinerja keuangan.

##### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah otonom adalah kemampuan keuangan daerah otonom tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu PAD.

Kemampuan keuangan daerah otonom dapat dikategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung kepada tingkat kemandirian keuangannya yang dapat dilihat pada tabel tingkat kemampuan keuangan daerah berikut :

**Tabel 6**  
**Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian(%)
RendahSekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	0-60

Sumber :Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim 2002

Untuk pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, diambil contoh untuk tahun 2004 untuk Kota Padang. Pada tahun 2004 PAD Kota Padang sebesar 68,646 milyar rupiah, sedangkan Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman sebesar 308,487 milyar rupiah, yang terdiri dari Sisa perhitungan tahun lalu 3,182 milyar rupiah, Dana Perimbangan 305,305 milyar rupiah, dan Pinjaman Rp. – (tidak ada pinjaman), maka untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat rumus berikut.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}} \\ &= \frac{68,646}{305,305 + 3,182} \\ &= 22,3\% \end{aligned}$$

Untuk tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat pada lampiran tabel 7 nilai rasio kemandirian keuangan daerah. Dilihat dari tabel, rasio kemandirian kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat pada periode anggaran 2004 sampai dengan 2011 secara keseluruhan, berada pada kategori rendah sekali yang berada pada rasio kemandirian 0%-25%.

## 2. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan antara realisasi PAD yang diperoleh dengan target PAD yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang

bersangkutan. Untuk melihat tingkat rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah, dapat dilihat dari tabel berikut :

Untuk pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah, diambil contoh untuk tahun 2004 untuk Kota Padang. Pada tahun 2004 Realisasi PAD Kota Padang sebesar 68,646 milyar rupiah, sedangkan Target PAD sebesar 77,948 milyar rupiah, maka untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{68,646}{77,948} = 88,1\% \end{aligned}$$

Dari hasil perbandingan Realisasi PAD dan Target PAD dari seluruh kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, maka rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui. Secara rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio 107,1% untuk tahun 2004, 102,1% untuk tahun 2005, 121,7% untuk tahun 2006, 122,3% untuk tahun 2007, 119,8% untuk tahun 2008, 103,9% untuk tahun 2009, dan semakin menurun di tahun 2010 menjadi 92,5%, dan meningkat lagi di tahun 2011 menjadi 111,1%. Secara rata-rata, kecendrungan efektivitas PAD kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2004-2011 sebesar 109,8% yang berada pada kategori sangat efektif.

### **3. Trend Kemandirian Keuangan Daerah**

Trend kemandirian keuangan daerah otonom menggambarkan kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar. Dari perhitungan rasio KKD pada tabel 7, dengan tahun dasar 2004, maka trend kemandirian keuangan tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 adalah seperti tampak pada tabel 10 trend kemandirian keuangan daerah pada lampiran.

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat diketahui, bahwa Kabupaten yang mengalami trend kemandirian yang meningkat dibandingkan dengan tahun dasar 2004 adalah Kota Sawahlunto. Sementara Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan tidak ada trend kemandiriannya untuk tahun 2005 karena baru menjadi daerah pemekaran pada tahun 2004 .

### **4. Trend Efektivitas Keuangan Daerah**

Trend efektivitas keuangan daerah menggambarkan kecenderungan arah perkembangan efektivitas keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar. Dari perhitungan rasio EKD pada tabel 9, dengan tahun dasar 2004, maka trend efektivitas keuangan tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 adalah seperti tampak pada tabel 11 trend efektivitas keuangan daerah pada lampiran.

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa Kota Payakumbuh pada tahun 2005 memiliki trend efektivitas keuangan statis dengan tahun dasar 2004. Dan terdapat tiga kabupaten/kota yang tidak mengalami trend efektifitas, karena baru menjadi daerah pemekaran pada tahun 2004 tersebut, yaitu Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan, Sedangkan kabupaten/kota lainnya mengalami trend kenaikan.

## **PEMBAHASAN**

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil perhitungan pada tabel 7, menunjukkan bahwa rasio kemandirian kabupaten/kota di

Propinsi Sumatera Barat pada periode anggaran 2004 sampai dengan 2011 secara keseluruhan, berada pada kategori rendah sekali yang berada pada rasio kemandirian 0%-25%.

Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio 7,6% dari tahun 2004-2011 pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0%-25%. Meskipun begitu, kecendrungan nilai kemandirian keuangan daerah setiap tahunnya sudah mulai meningkat secara keseluruhan.

Rasio kemandirian keuangan tertinggi diperoleh Kota Padang dari tahun 2004 sampai dengan 2011, yaitu secara berturut-turut 22,3%, 26,8%, 17,2%, 14,3%, 13,2%, 12,6%, 16,2% dan 16,1% dengan rasio rata-rata 17,3% meskipun hanya berada pada kategori rendah sekali. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah, untuk tahun 2004 diperoleh Kota Pariaman yaitu 2,8%. Di tahun 2005, 2006, dan 2007 diperoleh Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu secara berturut-turut 3,3%, 2,9%, dan 2,4%. Di tahun 2008 dan 2009, diperoleh Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu 2,3%, dan 2,1%. Di tahun 2010, diperoleh Kabupaten Solok Selatan, yaitu 2,5 %. Selanjutnya di tahun 2011 diperoleh Kota Pariaman sebesar 4,0%. Hal ini telah menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan sumbangan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Dwirandra (2006), menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama

pemerintah pusat dan pemerintah propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD.

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pada hampir keseluruhan pemerintahan kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat juga diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, yaitu dalam hal pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama PAD.

Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan yang tinggi dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah daerah yakin dapat menggali potensi daerah dengan maksimal sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Namun, dari penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD dengan nilai yang masih rendah, menunjukkan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat kurang yakin dapat menggali potensi daerah, sehingga PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak besar. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah kurang berani dalam menetapkan penerimaan pajak yang tinggi dalam sumber APBD. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak yakin pajak yang diterima oleh daerahnya dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah di APBD, sehingga PAD yang dianggarkan rendah.

Berdasarkan pertumbuhan PAD yang kecenderungannya mengalami peningkatan, pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi

Sumatera Barat dalam era otonomi daerah memang cukup mampu meningkatkan penerimaan PAD, terlihat dari beberapa kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan yang positif dalam penerimaan PAD, akan tetapi penerimaan tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga belum bisa memberikan kontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah. Alasan yang dapat digunakan untuk menerangkan hal ini antara lain, pemerintah daerah dalam hal mendorong pertumbuhan PAD cenderung mengandalkan pajak dan retribusi yang didasarkan oleh peraturan yang ditetapkan. Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak dan retribusi sebaiknya tidak hanya mengandalkan peraturan daerah semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik, dan optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

### **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Hasil perhitungan pada tabel 9 merupakan hasil perbandingan Realisasi PAD dan Target PAD dari seluruh kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, maka rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui. Secara rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio 107,1% untuk tahun 2004, 102,1% untuk tahun 2005, 121,7% untuk tahun 2006, 122,3% untuk tahun 2007, 119,8% untuk tahun 2008, 103,9% untuk tahun 2009, dan semakin menurun di tahun 2010 menjadi 92,5%, dan meningkat lagi di tahun 2011 menjadi 111,1%. Secara rata-rata, kecenderungan efektivitas PAD kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2004-2011 sebesar 109,8% yang berada pada kategori sangat efektif.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh Kota Solok untuk tahun 2004 dan 2005, yaitu secara berturut-turut 181,9%, dan 209,6%, tahun 2006 sebesar 158,1% diperoleh Kabupaten Limapuluh Kota, tahun 2007 diperoleh Kabupaten Solok Selatan sebesar 174,6%, tahun 2008 dan 2009 diperoleh Kota Pariaman secara berturut-turut, yaitu 159,4%, dan 137,5%, tahun 2010 diperoleh Kabupaten Padang Pariaman sebesar 122,9%, selanjutnya tahun 2011 diperoleh Kabupaten Sijunjung sebesar 154,0%, dengan kecendrungan rasio rata-ratanya dari tahun 2004 hingga 2011 adalah 140,2% sehingga berada pada kategori sangat efektif. Sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah terendah, untuk tahun 2004 diperoleh Kabupaten Sijunjung yaitu 69,3%, dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 122,3%. Di tahun 2005, diperoleh Kabupaten Pasaman Barat 55,6% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 93,1%. Di tahun 2006, diperoleh Kota Padang 89,7% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 92,8%. Di tahun 2007, diperoleh Kabupaten Pesisir Selatan 84,9% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 96,7%. Di tahun 2008, diperoleh Kabupaten Pasaman 67,7% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 93,7%. Di tahun 2009, diperoleh Kabupaten Limapuluh Kota 56,5% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 114,1%. Di tahun 2010, diperoleh Kabupaten Solok Selatan 47,2% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 105,0%. Selanjutnya di tahun 2011 diperoleh Kabupaten Dhamasraya sebesar 76,4% dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 84,1%.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat adalah berfluktuasi. Secara rata-rata dari tahun 2004 sampai dengan 2011, efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat adalah 140,2% yang berada pada kategori sangat

efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah pun semakin baik.

### **Trend Kemandirian Keuangan Daerah**

Hasil perhitungan dari tabel 10, menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kabupaten yang mengalami trend kemandirian yang meningkat dibandingkan dengan tahun dasar 2004 adalah Kota Sawahlunto.
2. Dibandingkan dengan tahun dasar 2004, beberapa kabupaten/kota pada tahun 2005 memiliki trend kemandirian yang meningkat, yaitu Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman. Sementara Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan tidak ada trend kemandiriannya untuk tahun 2005 karena baru menjadi daerah pemekaran pada tahun 2004. Sedangkan pada tahun 2006, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman. Di tahun 2007, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Kota Sawahlunto, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman. Di tahun 2008, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Kota Sawahlunto, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman. Di tahun 2009, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kota Pariaman. Di tahun 2010, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Dan untuk tahun 2011, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Kabupaten Tanah

Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman.

### **Trend Efektivitas Keuangan Daerah**

Hasil perhitungan dari tabel 11, menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kota Payakumbuh pada tahun 2005 memiliki trend efektivitas keuangan statis dengan tahun dasar 2004.
2. Delapan kabupaten/kota pada tahun 2005 memiliki trend efektivitas keuangan menurun dengan tahun dasar 2004, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Padang Panjang. Dan terdapat tiga kabupaten/kota yang tidak mengalami trend efektivitas karena baru menjadi daerah pemekaran pada tahun 2004 tersebut, yaitu Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan kabupaten/kota lainnya mengalami trend kenaikan.
3. Terdapat empat kabupaten/kota mengalami trend efektivitas keuangan menurun tahun 2006 dengan tahun dasar 2004, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya mengalami trend kenaikan.
4. Tahun 2007 terdapat empat kabupaten/kota mengalami trend efektivitas keuangan menurun dengan tahun dasar 2004, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, dan Kota Padang Panjang. Sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya mengalami trend kenaikan.
5. Tahun 2008 terdapat enam kabupaten/kota mengalami trend efektivitas keuangan menurun dengan tahun dasar 2004, yaitu

Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang Panjang. Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya mengalami trend kenaikan.

6. Sedangkan untuk tahun 2009 terdapat sepuluh kabupaten/kota yang mengalami trend efektivitas keuangan menurun, dan hanya sembilan kabupaten/kota yang mengalami trend kenaikan, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang Pariaman.
7. Tahun 2010 terdapat sembilan kabupaten/kota yang mengalami trend efektivitas keuangan menurun, dan sepuluh kabupaten/kota yang mengalami trend kenaikan, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman.
8. Dan untuk tahun 2011 lima kabupaten/kota yang mengalami trend efektivitas keuangan menurun, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya mengalami trend kenaikan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan rasio kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat pada periode anggaran 2004 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut.

1. Kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, secara rata-rata berada pada rasio 7,3% untuk tahun 2004, 7,5% untuk

tahun 2005, serta menurun menjadi 5,9% di tahun 2006, 5,6% untuk tahun 2007, dan semakin menurun di tahun 2008 menjadi 4,9%. Kemudian meningkat lagi menjadi 5,7% di tahun 2009, 7,3% untuk tahun 2010, dan 7,6% untuk tahun 2011. Secara rata-rata dari tahun 2004-2011 kemandirian keuangan daerah berada pada kecendrungan 6,5% yang menandakan pada kategori rendah sekali, karena berada pada rasio 0%-25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern ( terutama pemerintah pusat dan propinsi ) masih sangat tinggi.

2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat, berada pada rasio 107,1% untuk tahun 2004, 102,04% untuk tahun 2005, dan meningkat menjadi 121,7% di tahun 2006, 122,3% untuk tahun 2007, dan menurun menjadi 119,8% di tahun 2008, semakin menurun di tahun 2009 menjadi 103,9%, di tahun 2010 menjadi 95,5%, dan meningkat menjadi 111,1% di tahun 2011. Secara rata-rata dari tahun 2004-2011 berada pada kecendrungan sebesar 109,8% yang menandakan berada pada kategori sangat efektif.
3. *Trend* kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatra Barat, secara rata-rata berada pada persentase 107,1% untuk tahun 2005, serta menurun menjadi 88,4% di tahun 2006, 84,4% untuk tahun 2007, dan semakin menurun di tahun 2008 menjadi 75,7%. Kemudian meningkat lagi menjadi 86,5% di tahun 2009, 108,9% untuk tahun 2010, dan 116,0% untuk tahun 2011. Secara rata-rata dari tahun 2005-2011 *trend* kemandirian keuangan daerah berada pada kecendrungan 95,3% yang menandakan cenderung menurun, karena persentase kurang dari 100% .
4. *Trend* efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Propinsi Sumatra Barat, secara rata-rata berada pada

persentase 103,3% untuk tahun 2005, 129,1% di tahun 2006, 129,7% untuk tahun 2007, 125,5% di tahun 2008, 109,6% di tahun 2009. Kemudian menurun di tahun 2010 menjadi 97,7%, dan meningkat lagi tahun 2011 menjadi 118,7%. Secara rata-rata dari tahun 2005-2011 *trend* efektivitas keuangan daerah berada pada kecendrungan 116,2% , yang menandakan cenderung naik, karena persentase lebih dari 100% .

### **Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi untuk selanjutnya antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat, jadi belum terlihat secara menyeluruh kinerja keuangan pemerintah daerah secara luas.
2. Penelitian ini masih terbatas pada alat pengukuran/rasio dari satu sumber saja, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Saran**

Saran yang perlu diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah, sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan

alat pengukuran/rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A.N.B. Dwirandra. 2006. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006 (Skripsi)*. Universitas Udayana Bali.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE,UGM
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT.Bina Aksara.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Nadeak, Rusliana. 2003. *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi. Jurusan akuntansi, FE, Universitas sanata Dharma.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Simatupang, Paula. *Studi Komparasi Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Suwarno. 2007. *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah dengan Finansial Rasio terhadap Neraca Pemerintah Daerah*. Materi Orasi Ilmiah untuk Pengukuhan Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 2007.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2000. *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 1999. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan



Keuangan Antara Pusat dan  
Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  
di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi  
pada Daerah Tingkat II*. Jakarta. PT  
Raja Grafindo Persada.

### Lampiran

**Tabel 1**

Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  
Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat

No	Keterangan	Rasio Kemandirian (%)								Kategori	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata	Kategori
1	Kota Padang	22,3	26,8	17,2	14,3	13,2	12,6	16,2	16,1	17,3	Rendah Sekali
2	Kota Bukittinggi	11,8	11,7	10,3	9,0	7,1	10,0	12,3	11,4	10,4	Rendah Sekali
3	Kab.Tanah Datar	6,5	9,2	7,1	6,3	4,3	7,9	8,1	9,2	7,3	Rendah Sekali
4	Kota Payakumbuh	12,6	11,8	9,5	9,3	8,0	8,9	13,4	13,7	10,9	Rendah Sekali
5	Kab.Kep Mentawai	6,3	5,9	4,9	5,2	3,9	4,7	8,3	6,2	5,7	Rendah Sekali
6	Kab.Sijunjung	6,3	6,4	5,7	5,5	3,5	5,6	6,4	8,8	6,0	Rendah Sekali
7	Kab.Agam	4,6	4,5	4,0	4,0	3,0	4,4	3,7	6,3	4,3	Rendah Sekali
8	Kab.Padang pariaman	6,7	4,1	4,6	3,6	2,6	3,5	5,6	4,4	4,4	Rendah Sekali
9	Kota Sawahlunto	8,2	10,8	8,6	9,3	9,2	9,8	8,9	11,8	9,6	Rendah Sekali
10	Kota Solok	7,2	8,9	6,0	6,0	3,7	5,4	7,7	6,4	6,4	Rendah Sekali
11	Kab.Dharmasraya	-	5,7	5,1	5,1	5,6	6,4	7,9	9,0	6,4	Rendah Sekali
12	Kab.Limapuluh Kota	4,6	4,4	4,2	3,3	2,2	2,1	3,6	4,1	3,6	Rendah Sekali
13	Kab.Pasaman Barat	-	5,3	4,5	4,7	5,5	4,4	5,8	5,1	5,0	Rendah Sekali
14	Kab Solok	4,0	4,9	4,3	3,6	3,7	4,2	4,5	4,7	4,2	Rendah Sekali
15	Kab.Pesisir Selatan	3,3	3,3	2,9	2,4	2,6	2,8	3,3	4,5	3,1	Rendah Sekali
16	Kab.Pasaman	3,2	4,0	3,8	3,6	5,5	3,5	5,1	5,5	4,3	Rendah Sekali
17	Kota Padang Panjang	7,1	4,8	4,5	4,2	4,9	7,1	11,1	8,8	6,6	Rendah Sekali
18	Kota Pariaman	2,8	3,9	3,2	3,3	2,5	3,2	4,0	4,0	3,4	Rendah Sekali
19	Kab.Solok Selatan	-	5,5	3,5	4,3	2,6	2,5	2,5	4,1	3,6	Rendah Sekali
	Maksimal	22,3	26,8	17,2	14,3	13,2	12,6	16,2	16,1	17,3	
	Minimal	2,8	3,3	2,9	2,4	2,2	2,1	2,5	4,0	3,1	
	Rata-rata	7,3	7,5	6,0	5,6	4,9	5,7	7,3	7,6	6,5	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, 2013 (data diolah)

**Tabel 2**

Nilai Rasio Efektivitas Keuangan Daerah  
Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat

No	Keterangan	Rasio Efektivitas (%)								Kategori	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata	Kategori
1	Kota Padang	88,1	87,5	89,7	101,6	101,3	85,7	96,5	92,0	92,8	Efektif
2	Kota Bukittinggi	86,8	65,9	104,6	109,8	137,3	120,1	96,3	98,1	102,4	Sangat efektif
3	Kab.Tanah Datar	130,3	131,6	132,6	126,8	122,7	115,1	91,4	121,7	121,5	Sangat efektif
4	Kota Payakumbuh	93,3	93,3	100,4	128,7	115,7	107,8	106,2	110,9	107,0	Sangat efektif
5	Kab.Kep Mentawai	97,2	92,8	116,4	113,1	132,5	127,1	108,3	140,1	115,9	Sangat efektif
6	Kab.Sijunjung	69,3	99,2	134,1	140,4	151,8	132,7	96,6	154,0	122,3	Sangat efektif
7	Kab.Agam	103,2	88,5	158,1	130,0	129,6	129,5	76,2	108,1	115,4	Sangat efektif
8	Kab.Padang pariaman	165,7	94,6	112,3	126,0	140,0	108,4	122,9	92,7	120,3	Sangat efektif
9	Kota Sawahlunto	108,0	104,9	127,1	129,1	97,7	96,1	84,8	123,8	108,9	Sangat efektif
10	Kota Solok	182,0	209,6	153,2	106,3	138,8	127,6	93,8	110,5	140,2	Sangat efektif
11	Kab.Dhamasraya		69,4	107,3	107,4	97,5	66,8	63,7	76,4	84,1	Cukup efektif
12	Kab.Limapuluh Kota	101,3	93,3	158,1	157,8	153,2	56,5	73,5	119,3	114,1	Sangat efektif
13	Kab.Pasaman Barat	-	55,6	114,9	107,0	94,0	96,5	86,3	97,4	93,1	Efektif
14	Kab Solok	71,2	102,4	123,1	111,7	101,6	97,6	91,6	86,8	98,2	Efektif
15	Kab.Pesisir Selatan	73,4	94,3	110,5	85,0	110,4	103,0	78,4	118,8	96,7	Efektif
16	Kab.Pasaman	74,7	85,3	112,4	114,3	67,7	68,6	109,7	117,2	93,7	Efektif
17	Kota Padang Panjang	148,1	108,1	123,7	133,2	114,0	108,4	122,9	117,7	122,0	Sangat efektif
18	Kota Pariaman	121,2	159,9	119,2	121,5	159,4	137,5	111,5	131,9	132,8	Sangat efektif
19	Kab.Solok Selatan	-	102,8	114,3	174,6	111,8	91,0	47,2	93,5	105,0	Sangat efektif

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, 2013 (data diolah)

**Tabel 3**

Tabel Trend Kemandirian Keuangan Daerah  
Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat

No	Keterangan	Trend Kemandirian Keuangan Daerah (%)
----	------------	---------------------------------------

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Padang	120,5	77,1	64,1	59,2	56,6	72,7	72,3
2	Kota Bukittinggi	99,7	87,3	76,3	60,8	85,0	104,7	96,8
3	Kab.Tanah Datar	142,0	109,9	98,0	67,1	123,1	125,7	142,1
4	Kota Payakumbuh	94,1	75,5	73,7	63,6	71,0	106,9	109,0
5	Kab.Kep Mentawai	93,9	77,7	83,7	62,2	74,5	132,9	99,7
6	Kab.Sijunjung	102,3	90,2	88,0	56,2	88,7	102,1	140,6
7	Kab.Agam	96,8	85,3	86,3	64,5	94,7	80,4	136,2
8	Kab.Padang pariaman	60,7	68,7	53,8	39,4	52,2	83,4	65,8
9	Kota Sawahlunto	132,0	105,6	114,4	113,1	120,0	109,7	145,3
10	Kota Solok	124,3	83,1	83,2	51,8	74,4	106,9	88,7
11	Kab.Dhamasraya	-	90,2	89,4	98,0	112,6	139,5	157,7
12	Kab.Limapuluh Kota	96,6	90,5	72,5	48,9	45,9	79,0	89,1
13	Kab.Pasaman Barat	-	83,8	87,7	104,4	82,2	108,9	96,6
14	Kab Solok	119,9	106,2	89,5	91,2	104,4	111,0	115,4
15	Kab.Pesisir Selatan	99,6	88,0	72,4	78,9	86,1	98,8	136,3
16	Kab.Pasaman	124,5	120,6	113,7	171,4	110,5	160,6	172,1
17	Kota Padang Panjang	67,1	63,3	59,4	68,9	99,9	155,6	123,8
18	Kota Pariaman	139,2	114,5	118,9	90,3	115,6	144,7	143,2
19	Kab.Solok Selatan	-	62,8	77,6	47,7	45,7	44,8	73,9

**Tabel 4**

**Tabel Trend Efektivitas Keuangan Daerah  
Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat**

No	Keterangan	Trend Efektifitas Keuangan Daerah (%)						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kota Padang	99,4	101,9	115,3	115,0	97,3	109,6	104,5
2	Kota Bukittinggi	75,9	120,5	126,5	158,1	138,3	110,9	113,0
3	Kab.Tanah Datar	101,0	101,8	97,4	94,1	88,3	70,2	93,4
4	Kota Payakumbuh	100,0	107,7	138,0	124,0	115,5	113,8	118,9
5	Kab.Kep Mentawai	95,5	119,8	116,4	136,3	130,8	111,4	144,2
6	Kab.Sijunjung	143,2	193,6	202,6	219,2	191,6	139,5	222,4
7	Kab.Agam	85,8	153,2	126,0	125,5	125,4	73,8	104,7
8	Kab.Padang pariaman	57,1	67,8	76,1	84,5	65,4	74,2	56,0
9	Kota Sawahlunto	97,1	117,6	119,5	90,4	88,9	78,5	114,6
10	Kota Solok	115,2	84,2	58,4	76,3	70,1	51,5	60,8
11	Kab.Dhamasraya	-	154,7	154,8	140,5	96,2	91,7	110,0

12	Kab.Limapuluh Kota	92,1	156,1	155,8	151,2	55,8	72,6	117,8
13	Kab.Pasaman Barat	-	206,6	192,5	169,1	173,5	155,3	175,2
14	Kab Solok	143,8	173,0	156,9	142,7	137,0	128,6	121,9
15	Kab.Pesisir Selatan	128,5	150,5	115,8	150,4	140,3	106,8	161,8
16	Kab.Pasaman	114,2	150,5	153,1	90,7	91,9	146,9	156,9
17	Kota Padang Panjang	73,0	83,5	89,9	77,0	73,2	83,0	79,5
18	Kota Pariaman	131,9	98,3	100,2	131,5	113,5	92,0	108,8
19	Kab.Solok Selatan	-	111,2	169,9	108,8	88,6	45,9	90,9